

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM Mendukung KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA PUJIHARJO KECAMATAN TIRTOYUDO
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



**OLEH :
ANGGRIANI RENGGE
NIM. 2019210015**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2024

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan fasilitator pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka meningkatkan ketahanan keuangan masyarakat Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, validasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BUMDes Bangkit Sejahtera Desa Pujiharjo memadukan pendampingan usaha dengan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah bagi kelestarian lingkungan. Divisi usaha yang melaksanakan bantuan modal antara lain Penggilingan Batu Karang, Simpan Pinjam, dan Toko Bangkit Sejahtera. Pelaksanaan kebijakan BUMDes yang efektif terhambat oleh sejumlah faktor, seperti koordinasi kelembagaan yang belum memadai, minimnya komunikasi, dan minimnya sumber daya manusia. Kebijakan dan kegiatan pemerintah yang jelas, kemudahan akses terhadap sumber daya keuangan, serta lingkungan sosial yang positif menjadi unsur pendukung sementara.

Kata Kunci: Kebijakan BUMDes; Kemandirian Ekonomi Masyarakat; Desa Pujiharjo

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia masih merupakan negara berkembang dengan berbagai tantangan penting, terutama terkait dengan tujuan dan cita-cita pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Ristiana, 2020:89). Proyek pembangunan Indonesia harus dimulai dari pinggiran, dengan memperkuat penduduk pedesaan yang berada di dalam batas-batas negara kesatuan. Nawacita, presiden Republik Indonesia, memiliki sembilan agenda.

Pradani (2020:23) mendefinisikan Nawacita sebagai gagasan cita-cita luhur yang menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi negara dalam mencapai tujuannya: terkikisnya kewenangan pemerintah, kemerosotan ekonomi nasional, dan tingginya tingkat intoleransi dan krisis kepribadian di Indonesia. Ketiganya menjadi landasan penting bagi rencana pembangunan yang menekankan pembangunan di tingkat desa sebagai cara utama untuk meningkatkan daya saing global.

Kemiskinan memiliki dampak besar terhadap peningkatan taraf hidup, terutama di daerah pedesaan di mana kemiskinan dan keterbelakangan merupakan masalah yang meluas dan sulit diatasi. Dua ciri mendasar kemiskinan adalah keterbelakangan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Karena mereka memiliki lebih sedikit kemungkinan untuk menciptakan usaha dan terlibat dalam pasar, orang-orang yang berada dalam kemiskinan seringkali tertinggal oleh potensi yang lebih besar (Pajriah Suryana, 2018:88). Kemajuan ekonomi diprediksi akan menurunkan tingkat kemiskinan, namun kemiskinan merupakan masalah

substansial karena kompleksitasnya dan sifatnya yang multidimensi (Jamaluddin et al., 2019:21).

Sebagai badan hukum terkecil yang diakui di Indonesia, desa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses kemajuan ini, desa menjadi yang terdepan. Namun, perbedaan antara penduduk pedesaan dan perkotaan dipertegas oleh fakta bahwa desa sering kali diabaikan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan nasional telah ditetapkan sebagai respons terhadap hal ini. Sebagai konsekuensi dari strategi ini, desa tidak lagi diabaikan dan diberi bobot lebih besar dalam rencana pembangunan nasional.

Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola desa secara mandiri sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menegaskan peran dan tugas desa dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk kepentingan masyarakat. Menurut pedoman yang digunakan untuk pemberian dana desa, tujuan utama dana desa adalah untuk mendukung inisiatif dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat setempat.

Salah satu strategi untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan adalah dengan menciptakan program kewirausahaan yang mendorong pemikiran kreatif dan kemampuan mengenali peluang bisnis, menganalisis dan memecahkan masalah, memperluas jaringan, mengambil resiko yang terukur, memulai bisnis, dan mengelola usaha kecil. Dua langkah yang telah diambil Indonesia untuk meningkatkan ekonomi pedesaan adalah penciptaan proyek Program Pengembangan Masyarakat Nasional, seperti pembentukan badan usaha

milik desa, atau BUMDes, dan penyediaan infrastruktur dan fasilitas (Kania Anggadwita & Alamanda, 2021).

Masyarakat memiliki seluruh atau sebagian modal perusahaan yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Uang ini berasal dari aset desa yang dibagi dan digunakan untuk mengelola aset tersebut, menyediakan layanan, dan melakukan tugas-tugas lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa mendirikan BUMDes untuk menampung semua kegiatan ekonomi yang diaturnya. Masyarakat kemudian mengelola BUMDes secara bersama-sama. Mengembangkan ekonomi desa dan memanfaatkan sumber daya desa secara maksimal merupakan dua cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, dengan bekerja sama dengan lembaga lain atau masyarakat sekitar, BUMDes dapat menjadi poros utama sistem pemberian layanan sosial masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Melalui penerapan kebijakan yang mendukung perekonomian daerah dan kemudahan akses terhadap layanan publik, BUMDes dapat membantu kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, perekonomian desa akan berkembang dan lebih merata, terutama dalam hal pendapatan pokok desa (Hidayah dan Mulatsih, 2020). Pengembangan BUMDes diperlukan agar BUMDes dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. BUMDes dapat mencapai tujuannya jika dikelola dan dikendalikan secara efektif. Karena BUMDes dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi

masyarakat, maka BUMDes diyakini dapat menopang dan mengembangkan perekonomian desa.

Untuk mengakomodasi tenaga kerja di daerah pedesaan, Kushartono dan Edy Agunggunanto (2016) berpendapat bahwa keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa secara kreatif dan inovatif. Desa Pujiharjo merupakan salah satu permukiman di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. BUMDes Desa Pujiharjo telah menyusun rencana pengelolaan potensi desa untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Bagi warga Desa Pujiharjo, sektor pekerjaan utama adalah perkebunan, perikanan, dan industri pariwisata. Hasil perkebunan dan kelautan hanya ditanam oleh masyarakat dan dijual dengan harga murah sebelum terbentuknya BUMDes. Setelah terbentuknya BUMDes, masyarakat diberikan pendampingan dan pelatihan agar mampu mengolah hasil perkebunan dan kelautan sebelum dijual sebagai bahan baku.

Harga jual produk olahan hasil laut seperti ikan teri goreng, stik udang, dan kerupuk ikan bisa naik saat dijual. Istri nelayan juga diberikan kewenangan sebagai buruh kontrak agar tetap produktif sembari menunggu suami pulang melaut. Selain mengelola perusahaan jasa angkutan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, BUMDes juga mengelola berbagai unit usaha lain seperti agen perbankan, kafe, penyedia jasa, penyewaan kios, dan unit pengelolaan hasil laut. BUMDes juga bekerja sama dengan Samsat dan Bank Jatim dalam proyek-proyek ini.

Selain membantu masyarakat dalam mengelola potensi yang dimilikinya, BUMDes Pujiharjo juga berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki dusun tersebut. Selain itu, BUMDes juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pinjaman dana bagi hasil sebesar 50% untuk BUMDes dan 50% untuk masyarakat kepada warga sekitar yang memiliki perusahaan namun menginginkan pendanaan. Dengan memperluas dan mengembangkan usahanya, masyarakat dapat memperoleh manfaat yang besar dari program ini. Dengan lebih menitikberatkan pada pinjaman, tabungan, dan perjalanan dinas, program kerja BUMDes Pujiharjo sama dengan program kerja BUMDes lainnya. Sementara itu, unit usaha pengelolaan hasil laut menjadi sangat penting karena BUMDes Pujiharjo memaksimalkan potensi hasil tangkapan nelayan. Selain memberikan pelatihan, proyek BUMDes yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat ini juga memberdayakan istri nelayan. Berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat Desa Pujiharjo, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan penelitian ini adalah;

1. Seberapa besar bantuan yang diberikan rencana usaha milik desa di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, bagi masyarakat setempat dalam upaya mencapai kemandirian finansial?

2. Bagaimana dukungan atau hambatan yang dialami oleh warga Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dalam meningkatkan kemandirian ekonominya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan agar warga Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dapat mandiri secara ekonomi melalui penerapan ketentuan usaha milik desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan usaha milik desa dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah;

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah memberikan arahan untuk penyelidikan kualitatif menyeluruh terhadap model kebijakan Bumdes yang berupaya mendukung masyarakat Desa Pujiharjo dalam mencapai kemandirian ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Menurut Pemerintah Desa Pujiharjo, penelitian dapat memberikan informasi dan rekomendasi untuk penyelidikan atau evaluasi tentang peran badan usaha milik desa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Chikamawati, Z. 2015. Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan sumber Daya Manusia. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 5(1).
- Eko, S. dan Tim FPPD. 2014. Membangun Badan Usaha Milik Desa yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan. Kerjasama FPPD dengan ACCES.
- Kurniawan, A. E. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Jurnal]. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.*
- Maryunani. 2008. Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rosidin, U. 2019. Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Bandung: Pustaka Setia.
- Sentoso, Sembiring. 2017. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Soerjono, Soekanto. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: IKAPI.
- Suwondo dkk. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.
- Wahyudi A. 2016. Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. *JIAP Vol. 2, No. 2, pp 101-105, 2016.*
- Zulkarnain, 2003. Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Hamid, Hendrawati. 2018. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: De La Macca.
- Karjuni, DT Marni. 2011. Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat Demokrasi.

Djamaludin, Ancok. 2002. Membangun Kepercayaan Menuju Indonesia Madani, Demokratis dan Damai (Sebuah Tinjauan Psikologi Sosial). *Jurnal Buletin Psikologi*, 10.2 (2002), 20-21.

Heru, Juabdin Sada. 2017. Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2017).